

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Secara umum kondisi ekonomi makro Kabupaten Karawang cukup baik dengan ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Kondisi ekonomi makro di Kabupaten Karawang ini tidak terlepas dari pengaruh kondisi ekonomi global dan nasional dimana Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator, dalam beberapa tahun terakhir berada pada kisaran lima hingga enam persen per tahun, kecuali mengalami penurunan pada 2009, saat terkena imbas oleh krisis finansial. Pertumbuhan ekonomi yang stabil menggambarkan kecenderungan yang stabil dalam peningkatan belanja masyarakat. Keadaan ini mengindikasikan pasar yang kondusif.

Iklim pasar yang positif juga didukung oleh besarnya Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam tataran teknis, PDB adalah proksi dari laba operasi dunia usaha), yaitu sekitar Rp 6.300 triliun (2010) yang diperkirakan naik menjadi sekitar Rp 7.000 triliun (2011). Kegiatan ekonomi ini ditunjang pengendalian inflasi. Meski pengaruh kenaikan harga bahan bakar internasional jelas terlihat, seperti pada 2005 dan 2008, namun inflasi masih dapat terkendali pada tahun berikutnya, yaitu di bawah dua digit.

Pengendalian inflasi mendorong kestabilan pada nilai tukar dan suku bunga. Nilai tukar bergerak dalam kisaran Rp 8.900-9.000 per dolar AS, kecuali pada saat *shock* finansial(2008). Demikian pula rujukan suku bunga, BI Rate, yang bertengger pada 6.5 % dalam tiga tahun terakhir.

Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan membaik menjadi 4,1% setelah sebelumnya melambat dari 3,9% di tahun 2011 menjadi 3,5% ditahun 2012 (WEO Apr'12, IMF). Maret 2012, Pemerintah China merevisi proyeksi pertumbuhannya dari 8,0% menjadi 7,5% , sementara India dari 7,5% menjadi 6,9%.

Perlambatan ekonomi dan revisi perkiraan pertumbuhan didorong oleh terjadinya perlambatan di sektor perdagangan

internasional. Di tahun 2012, hampir seluruh negara berkembang Asia mengalami perlambatan ekspor, akibat melemahnya permintaan dari negara maju khususnya kawasan eropa. Ekspor Indonesia pada tahun 2012 diperkirakan akan melambat dari 27,5% (yoy) menjadi 13,5% (yoy).

Target Pertumbuhan PDB tahun 2012 sebesar 6,5%

Kontribusi ekspor netto menurun akibat perlambatan ekspor

Kontribusi investasi meningkat:

- Perbaikan iklim investasi
- Program MP3EI

Konsumsi RT masih cukup baik

- Kompensasi bila terjadi Kenaikan BBM

Sektor industri pengolahan, perdagangan dan transportasi masih menjadikontributor pertumbuhan terbesar

Perkiraan Inflasi 2012

Berdasarkan perkembangan terkini, perkiraan baseline inflasi menurun dari 4,33% (RAPBN-P2012) menjadi 4,13%.

Kenaikan HPP beras pada skenario terjadinya kenaikan BBM bersubsidi lebih besar, akibat dampak lanjutan (*2nd round effect*) dari harga BBM Skenario Pembatasan BBM bersubsidi diperkirakan tetap membawa dampak pada kenaikan biaya transportasi

Ekspektasi inflasi telah meningkat di awal tahun seiring rencana kenaikan harga BBM, penundaan penyesuaian harga BBM bersubsidi dapat dorong inflasi lebih tinggi.

Melihat factor-faktor diatas, Kondisi perekonomian Kabupaten Karawang pada tahun 2013 diharapkan tetap dapat tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal-hal yang perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan tahun 2013 adalah peningkatan inflasi sebagai dampak dari rencana Pemerintah Pusat untuk melakukan pembatasan Bahan Bakar Minyak, serta peningkatan harga pangan akibat krisis di Timur Tengah dan perubahan iklim. PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2013 diperkirakan dapat mencapai Rp. 23,099,429,00 dan PDRB per kapita

atas dasar harga konstan diharapkan sebesar Rp. 10,708,164,00. Laju pertumbuhan ekonomi **migas** dapat tumbuh sebesar 5,62 % dengan tingkat inflasi 2,21 %. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, kondisi ekonomi makro di Kabupaten Karawang diharapkan stabil dan perlu didukung kebijakan struktural seperti perbaikan iklim investasi, upaya peningkatan daya saing dan produktivitas serta perbaikan kualitas sumberdaya manusia. Sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang tidak hanya terjadi pada peningkatan konsumsi melainkan juga terjadi peningkatan investasi dan peningkatan ekspor. Dimana hal tersebut dapat menjawab kendala pembangunan ekonomi yaitu tingkat pengangguran yang masih tinggi serta membuka peluang kesempatan kerja dan berusaha bagi kelompok masyarakat usia produktif. Kondisi Ekonomi Kabupaten Karawang pada tahun 2009-2010 dan prediksi 2011-2012 dapat dilihat dari beberapa indikator makro sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prediksi Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Karawang

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi	
			2010**	2011**
1	PDRB (Harga Berlaku)*	juta rupiah	57.046.690,09	63.078.939,56
2	PDRB (Harga Konstan)*	juta rupiah	21.767.794, 32	23.099.431,90
3	Pertumbuhan Ekonomi (Tanpa Migas)	%	10,43*	6,12*
4	Tingkat Inflasi*	%	7,73*	3,21*
5	Jumlah Penduduk	orang	2.124.565*	2.165.996
6	Jumlah Penduduk Miskin**	%	12,21	13,06
7	Tingkat Pengangguran **	%	3,8	10
8	PDRB per kapita atas dasar HK*	Rp	10.230.231	10.708.166
9	PDRB per kapita atas dasar HB*	Rp	26.810.288	29.241.402
10	Produk Domestik Regional Netto atas dasar Biaya Faktor/Pendapatan Regional (HK)*	juta rupiah	21.767.794	23.099.431
11	Produk Domestik Regional Netto atas dasar Biaya Faktor/Pendapatan Regional (HB)*	juta rupiah	57.046.690	63.078.939

Sumber : BPS Kabupaten Karawang

Keterangan : *) = angka revisi; **) = angka estimasi

Berdasarkan latar belakang kondisi ekonomi Kabupaten Karawang pada tahun-tahun sebelumnya dan dengan mempertimbangkan kondisi umum perekonomian Nasional dan regional Jawa Barat, ekonomi daerah Kabupaten Karawang tahun 2013 dalam konteks makro regional diestimasikan masih mampu berkembang dan tumbuh secara dinamis dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prediksi perekonomian tahun 2013 diharapkan akan lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, walaupun mungkin akan sedikit melambat pada awal tahun, akibat kenaikan harga barang yang terjadi sebagai dampak dari rencana pencabutan subsidi BBM untuk kendaraan roda pribadi roda empat di atas 1500cc. Hal tersebut tentu saja akan berpengaruh langsung terhadap perekonomian makro secara nasional. Kenaikan harga barang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, terutama masyarakat rentan dan juga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi untuk sementara waktu sehingga pada tahun 2013 diperlukan berbagai upaya untuk dapat meredam dampak yang diperkirakan akan terjadi tersebut.

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Karawang dan melihat prospek perekonomian tahun 2013 maka fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Karawang adalah:

1. Meningkatkan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing;
2. Meningkatkan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor dan memiliki daya saing;
3. Meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan, kelautan dan kehutanan yang berorientasi pada sistem agribisnis dan agroindustri guna mempertahankan ketahanan pangan daerah;
4. Meningkatkan kualitas produk sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata melalui pemanfaatan dan inovasi teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung;
5. Meningkatkan investasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

Asumsi-asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Karawang Tahun 2013 adalah :

Tabel 3.2

Prediksi Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Karawang

No	Indikator Makro	Satuan	Proyeksi 2013
1	PDRB (Harga Berlaku)*	juta rupiah	63,078,937.00**
2	PDRB (Harga Konstan)*	juta rupiah	23,099,429.00**
3	Pertumbuhan Ekonomi (Tanpa Migas)	%	5,62**
4	Tingkat Inflasi*	%	2,21**
5	Jumlah Penduduk	orang	2,382,595
6	Jumlah Penduduk Miskin**	%	13,00**
7	Tingkat Pengangguran **	%	9**
8	PDRB per kapita atas dasar HK*	Rp	10,708,164.00**
9	PDRB per kapita atas dasar HB*	Rp	29,241,400.00**
10	Produk Domestik Regional Netto atas dasar Biaya Faktor/Pendapatan Regional (HK)*	juta rupiah	63,078,937.00**
11	Produk Domestik Regional Netto atas dasar Biaya Faktor/Pendapatan Regional (HB)*	juta rupiah	23,099,429.00**

Sumber : BPS Kabupaten Karawang

Keterangan : *) = angka revisi; **) = angka estimasi

Prioritas kebijakan pembangunan Kabupaten Karawang tahun 2013 difokuskan pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui ;

1. Peningkatan kesejahteraan social melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta perwujudan kehidupan social yang religious dan harmonis;
2. Peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, perikanan, industry, perdagangan, koperasi, ketenagakerjaan dan pariwisata;

3. Peningkatan sarana dan prasarana dasar infrastruktur dan pembangunan pedesaan;
4. Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan tata ruang;
5. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab.:

Berdasarkan prioritas di atas, kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Karawang adalah Peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, perikanan, industry, perdagangan, koperasi, ketenagakerjaan dan pariwisata. Oleh karena itu target pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2013 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Target Kinerja di Bidang Ekonomi Tahun 2013 Kabupaten Karawang

No	Indikator Kinerja Tematik	Kondisi Awal 2011	Target 2013
1	Pengembangan sentra produksi perikanan (mina bisnis)	38.396,07 Ton Ikan	4,031,587.35 Ton Ikan
2	Pengembangan IKM	3.450 UKM	3.850 UKM
3	Pengembangan Pasar	29 Unit Pasar Tradisional dan Penunjang	29 Unit Pasar Tradisional dan Penunjang
4	Penguatan kapasitas usaha KUMKM	226 UKM	300 UKM
5	Penyediaan fasilitas, regulasi dan iklim usaha kepariwisataan daerah	PAD Kepariwisata Rp. 189.455.000,00	PAD Kepariwisata Rp. 189.455.000,00
6	Pengembangan sarana dan prasarana obyek daya tarik wisata (ODTW)	31 ODTW	35 ODTW

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.2.1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2013

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2013 pada dasarnya adalah menerapkan konsep penguatan dan keberlanjutan dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun pertama RPJMD (2011 dan 2012) dengan pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk terus berupaya meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat

dipertanggungjawabkan. kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah perlu terus diupayakan melalui proses analisa dan perencanaan yang matang tanpa menimbulkan *high cost economy* terhadap perkembangan arus investasi.

Pelaksanaan Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal, dituangkan dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selain itu, terdapat juga UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur hal-hal mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah. Dalam prakteknya, instrumen utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (*taxing power*) dan transfer ke daerah. UU Nomor 28 Tahun 2009 yang baru saja dikeluarkan dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2010 merupakan salah satu wujud upaya penguatan *taxing power* daerah, yaitu dengan perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, dan pemberian diskresi penetapan tarif pajak.

Adapun optimalisasi pendapatan daerah melalui :

1. Optimalisasi pendapatan asli daerah yang diarahkan pada :
 - a. Penyesuaian berbagai peraturan dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Pendekatan ekstensifikasi untuk perluasan basis pajak serta intensifikasi dalam bentuk perubahan regulasi guna peningkatan basis pajak tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.
 - c. Peningkatan pelayanan dan kepatuhan wajib pajak . Peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah yang dibarengi dengan penerapan akuntabilitas dan pemantapan kinerja pelayanan unit pemungut dan pengelola pendapatan

dalam bentuk insentif, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

- d. Perbaiki kinerja dan pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif dalam rangka peningkatan kontribusi laba terhadap pendapatan asli daerah
 - e. Peningkatan tarif retribusi daerah yang dipungut oleh SKPD disertai peningkatan pengawasan pemungutannya
 - f. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BLUD
 - g. Meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari deviden BUMD sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - h. Upaya peningkatan PAD juga harus dilakukan dengan memperhatikan aspek biaya – manfaat yang dihasilkan, yaitu harus memperhitungkan rasio tingkat biaya pemungutan dengan tingkat realisasi penerimaan, oleh sebab itu efisiensi dan efektifitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah oleh SKPD yang berkompeten harus dilakukan secara akuntabel.
 - i. Kebijakan lain terkait peningkatan pendapatan asli daerah yang akan dilaksanakan adalah pendayagunaan kekayaan atau aset-aset daerah yang *idle* baik secara langsung maupun melalui bentuk kerjasama dengan pihak ketiga.
2. Konsep *revenue sharing* atas perimbangan keuangan Pusat dan Daerah memerlukan langkah-langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Karawang dalam :
- a) Melakukan pemantauan, pendataan dan analisa terhadap wajib pajak seperti sumber daya alam dan kontribusi penerimaan yang disetorkan ke Pusat maupun Propinsi.
 - b) Berkoordinasi serta melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan.
3. Upaya untuk memperoleh alokasi DAK diarahkan pada meningkatkan penyediaan data-data teknis, koordinasi pengelolaan

DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah, sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di daerah. Berdasarkan kebijakan DAK, terdapat beberapa bidang yang memiliki potensi memperoleh alokasi DAK meliputi : (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Keluarga Berencana; (4) Infrastruktur Jalan; (5) Infrastruktur Irigasi; (6) Infrastruktur Air Minum; (7) Infrastruktur Sanitasi; (8) Prasarana Pemerintahan Daerah; (9) Kelautan dan Perikanan; (10) Pertanian; (11) Lingkungan Hidup; (12) Kehutanan; (13) Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal; (14) Sarana Perdagangan; (15) Transportasi Perdesaan; (16) Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan; (17) Listrik Perdesaan; (18) Perumahan dan Permukiman; serta (19) Keselamatan Transportasi Darat.

4. Kebijakan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian merupakan amanat dari UU Nomor 35 Tahun 2008, yang dialokasikan antara lain untuk dana penyesuaian berupa dana tambahan penghasilan guru PNSD, Dana Insentif Daerah, dana tambahan untuk tunjangan profesi guru (TPG), dan bantuan operasional sekolah (BOS). Dana Insentif Daerah terutama ditujukan kepada daerah berprestasi yang memiliki kriteria keuangan dan kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan yang baik, serta tetap mengupayakan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu, dana tambahan untuk TPG sejalan dengan telah ditetapkan PP Nomor 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, yang dialokasikan mulai tahun 2010. Dana tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya, sesuai dengan kewenangannya.

Kebijakan belanja daerah pada APBD-P 2013 diarahkan pada :

1. Pengalokasian belanja pegawai
2. Belanja Hibah
3. Belanja bantuan sosial
4. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa
5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

6. Belanja Tidak Terduga

3.2.2. REKAPITULASI REALISASI DAN PROYEKSI (PAGU INDIKATIF) KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Asumsi yang digunakan untuk memprediksi APBD Perubahan Kabupaten Karawang 2013 antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah

Adanya pengalihan PBB Perkotaan dan Perdesaan menjadi Pajak Daerah. (Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah);

Ekstensifikasi Pendapatan Daerah (Retribusi);

Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana bagi hasil tidak berkurang.

3. Belanja Daerah

Pagu belanja ditetapkan sesuai pagu belanja pada APBD Murni tahun 2013, dengan peningkatan pagu pada kegiatan-kegiatan yang sangat mendesak untuk dilaksanakan dan bersifat reposisi serta tidak adanya pengeluaran untuk pendanaan keadaan darurat dan luar biasa. Berdasarkan asumsi di atas, Pendapatan dan Belanja pada APBD Perubahan Tahun 2013 diprediksikan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Rencana dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang
Tahun 2012-2013

NO	URAIAN	PERDA APBD MURNI TA 2013	REPERDA PERUBAHAN APBD	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	PENDAPATAN DAERAH	2.353.841.086.857,00	2.514.368.341.009,00	160.527.254.152,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	479.943.817.140,00	534.540.965.677,00	54.597.148.537,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	307.835.394.292,00	350.315.700.000,00	42.480.305.708,00
1.1.2	Retribusi Daerah	53.430.168.580,00	52.913.018.580,00	(517.150.000,00)

1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.118.279.406,00	5.673.576.689,00	555.297.283,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	113.559.974.862,00	125.638.670.408,00	12.078.695.546,00
1.2	Dana Perimbangan	1.488.992.466.180,00	1.494.906.258.075,00	5.913.791.895,00
1.2.1	Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	248.922.046.180,00	254.835.838.075,00	5.913.791.895,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.134.530.200.000,00	1.134.530.200.000,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	105.540.220.000,00	105.540.220.000,00	0,00
1.3	Lain-lain pendapatan yang sah	384.904.803.537,00	484.921.117.257,00	100.016.313.720,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.879.475.000,00	2.879.475.000,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	161.310.080.537,00	161.310.080.537,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	164.132.014.000,00	257.414.082.120,00	93.282.068.120,00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	55.463.234.000,00	62.197.479.600,00	6.734.245.600,00
1.3.6	Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi.	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	0,00
2	BELANJA DAERAH	2.778.186.807.645,00	3.018.481.548.155,00	240.294.740.510,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.267.906.434.380,00	1.380.284.380.250,00	112.377.945.870,00
2.1.1	Belanja Pegawai	1.035.809.350.150,00	1.131.567.915.020,00	95.758.564.870,00
2.1.2	Belanja Hibah	95.307.000.000,00	95.307.000.000,00	0,00
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	15.815.000.000,00	20.434.381.000,00	4.619.381.000,00
2.1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi / Kabupaten / Kota / Pemerintah Desa	43.548.013.550,00	43.548.013.550,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi / Kabupaten / Kota / Pemerintah Desa dan Partai Politik	69.927.070.680,00	81.927.070.680,00	12.000.000.000,00
2.1.6	Belanja Tak Terduga	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00
2.2	Belanja Langsung	1.510.280.373.265,00	1.638.197.167.905,00	127.916.794.640,00
2.2.1	Belanja Pegawai	249.248.175.318,00		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600.784.563.835,00		
2.2.3	Belanja Modal	660.247.634.112,00		
	Surplus /(Defisit)	(424.345.720.788,00)	(504.113.207.146,00)	(79.767.486.358,00)
3	Pembiayaan Daerah	424.345.720.788,00	495.169.420.146,00	70.823.699.358,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	429.345.720.788,00	500.169.420.146,00	70.823.699.358,00
3.1.1	Silpa Tahun Anggaran sebelumnya	429.345.720.788,00	500.169.420.146,00	70.823.699.358,00
3.1.2	Pemberian Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	
3.1.3	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00

3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
3.3	PEMBIAYAAN NETTO	424.345.720.788,00	495.169.420.146,00	70.823.699.358,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	(8.943.787.000,00)	(8.943.787.000,00)

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA